

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Secara umum pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya merupakan proses sosialisasi politik yang di dalamnya merupakan upaya edukatif guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh partai politik. Dalam proses pendidikan politik tersebut para kader di berikan pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman baru dalam mentransformasikan nilai-nilai dan orientasi politiknya terhadap sistem ideal yang di harapkan. Sehingga dalam praksisnya setiap kader memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya guna berkontribusi serta berpartisipasi aktif dalam medan perjuangan politik.

Dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya, sangat kental nuansa nilai-nilai perjuangan yang dimiliki oleh tiap partai politik dalam mewujudkan sistem ideal yang di kehendaknya. Asas atau platform yang dimiliki oleh setiap partai memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai sistem apa yang hendak dicapai dalam medan perjuangan politik, dan hal tersebutlah yang di berikan kepada para kader. Namun asas atau platform yang dimiliki setiap partai politik nyatanya tidak berbenturan dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara.

Hal ini di karenakan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas, dan dimensi realitas. Ketiga dimensi ini membuat suatu perkembangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila, dimana Dimensi Idealisme yaitu nilai-nilai dasar dari kelima sila Pancasila tetap utuh dan tidak mengalami perubahan walaupun asas atau platform partai mempengaruhinya. Hal yang membuat Pancasila tidak mengalami perubahan tersebut di karenakan Dimensi Fleksibilitas yang dimiliki oleh Pancasila, sehingga Pancasila

mampu berkorelasi dengan asas atau platform partai dan berkembang dalam Dimensi Realitas kehidupan partai politik dalam keorganisasiannya.

5.1.2 Simpulan Khusus

1. Makna pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kader merupakan suatu kegiatan edukatif yang dilakukan oleh partai untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para kader terhadap orientasi nilai-nilai perjuangan dari partai politik. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik secara sistematis, berjenjang, dan berkesinambungan. Dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya tersebut, setiap partai politik memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda-beda dalam setiap jenjang kaderisasi. Namun dengan tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan sumber daya kader yang berkarakter sesuai dengan watak dari partainya masing-masing.
2. Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik memiliki platformnya masing-masing, namun dalam AD/ ART setiap partai politik mendudukkan Pancasila sebagai tujuan akhir dalam pembentukan partai politik, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Platform partai politik mempengaruhi dengan cara apa dan bagaimana proses perwujudan cita-cita nasional tersebut dapat terwujud; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukannya dengan cara Trisakti ajaran Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera melakukannya dengan dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan dalam mewujudkan masyarakat madani yang di ridlai Allah subhanahu wa ta'ala dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pendekatan, metode, dan media yang dilakukan oleh setiap partai politik ini sekaligus merupakan pelaksanaan dari rekrutmen partai politik dalam menjalankan fungsinya. Agar partai politik dapat menjaga eksistensinya, partai politik membutuhkan banyak anggota. Oleh karena itu rekrutmen partai politik menjadi

suatu kebutuhan yang perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan serta kelestarian partai politik. Dengan adanya rekrutmen partai politik ini sekaligus menjadi sarana internal partai dalam meningkatkan sumber daya kader. Sehingga ketika dalam momentum pemilihan pimpinan partai, partai politik memiliki banyak kader yang dapat diseleksi dalam menentukan pilihannya.

4. Hambatan yang dihadapi oleh partai politik dalam melaksanakan program pendidikan politik kepada para kader tersebut diantaranya adalah masalah pendanaan dan kehadiran anggota yang tidak dapat mengikuti kegiatan secara intens. Oleh karena itu partai politik dalam menghadapi hambatan tersebut melakukan berbagai upaya agar materi yang akan di berikan kepada para kader dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga kader mampu memahami dan mengerti maksud dan tujuan pemberian materi yang dilakukan oleh partai politik tersebut.

5.2 Implikasi

Penelitian Pendidikan Politik Sebagai Wahana Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Partai Politik (Studi Kasus Terhadap Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat) memberikan suatu pemahaman baru terhadap bidang keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan keorganisasian yang dilakukan oleh partai politik terhadap para kadernya dalam proses pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia ke arah peningkatan partisipasi politik dari warga negara.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya sama dengan pendidikan kewarganegaraan pada umumnya yang berusaha untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman baru terhadap sistem politik yang berlaku terhadap warga negara. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk informal, yakni pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan bukan oleh lembaga pendidikan formal. Tetapi memiliki makna dan esensi yang sama dengan pendidikan kewarganegaraan di lembaga formal.

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Bagi Partai Politik

- Pendidikan politik merupakan esensi dari partai politik, dalam arti pendidikan politik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh partai politik di luar perebutan kekuasaan. Oleh karena itu pendidikan politik baik kepada anggota masyarakat atau kepada para kader perlu mendapatkan perhatian serius guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Pemberian materi perlu ditambahkan terkhusus mengenai pemahaman ideologi negara dan sistem politik di Indonesia, hal ini dikarenakan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan salah satu wahana sosialisasi politik yang efektif dalam percepatan pembangunan demokratisasi di Indonesia menuju demokrasi substansial.

5.3.2 Bagi Pemerintah

5.3.2.1 Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

- Pengawasan terhadap partai politik perlu dilakukan terkhusus mengenai pertanggung jawaban partai politik terhadap pelaksanaan program pendidikan politik yang diselenggarakannya.
- Hal ini menjadi perlu karena masih minimnya transparansi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, namun pengawasan bukan dalam arti pembatasan terhadap gerak langkah dari setiap partai politik, melainkan mendukung serta memperhatikan perkembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakannya.

5.3.2.2 Bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat

- Pendidikan politik merupakan suatu wahana yang efektif dalam memberikan pemahaman mengenai ideologi serta sistem politik yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu perhatian yang cukup serius perlu dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat kepada setiap partai politik dalam pelaksanaan setiap kegiatan program pendidikan politik yang diberikannya kepada masyarakat.

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu memperhatikan materi-materi apa saja yang diberikan oleh partai politik terhadap masyarakat, guna menghindari paham-paham yang melenceng dan tidak sesuai dari norma yang berlaku di Indonesia.

5.3.3 Bagi Praktisi Pendidikan Kewarganegaraan

- Pengembangan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terjadi di ruang kelas yang dilakukan secara formal, *civil society* memiliki segenap potensi yang kaya untuk di kaji dalam perkembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan.
- Kajian pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjangkau sampai kepada hal-hal tersebut, guna mendorong percepatan pembangunan di bidang keilmuan.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

- Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai masalah yang dimiliki oleh partai politik dalam proses penyelenggaraan pendidikan politik. Hal ini menjadi perlu sebagai pengawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan guna memberikan sumbangsih yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.